

PENURUNAN SUARA PKB DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KABUPATEN JOMBANG DAN UPAYA-UPAYA MENGATASINYA¹

Sitairesmi N.R.P Puteri (071013016)²

Abstrak

Penelitian yang berjudul “*Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Jombang dan Upaya-upaya Mengatasinya*” diangkat karena penulis ingin mengetahui penyebab penurunan suara bagi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejauh mana PKB mengupayakan penguatan elektabilitasnya di Kabupaten Jombang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan apakah penyebab terjadinya penurunan suara PKB di Kabupaten Jombang serta bagaimana upaya PKB untuk mengembalikan eksistensi dan berkembang di Kabupaten Jombang. Penelitian ini di analisis dengan teori partai untuk dapat melihat struktur internal PKB. Dalam penelitian ini ditemukan penyebab penurunan suara PKB di Kabupaten Jombang karena beberapa faktor yaitu, konflik dualisme di internal PKB, terpecahnya suara di internal NU, dan *money politic*. Dan sejauh ini upaya yang dilakukan PKB adalah yang pertama konsolidasi partai, pembelajaran politik dan sosialisasi kepada kader PKB, mengalokasikan dana APBD sebaik-baiknya, serta perencanaan yang sudah disusun untuk menghadapi masyarakat yang cenderung Pragmatis. Menurut peneliti, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kekecewaan dari warga Nahdhatul Ulama (NU) atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap tidak fokus lagi pada tujuan awal, serta adanya hegemoni Kyai yang beralaku dan juga adanya budaya dari masyarakat Jombang yang menikmati politik uang para politisi.

Kata kunci : Konflik internal, Hegemoni, *Money Politics*, Konsolidasi

Abstract

Study entitled appointed as the “*Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Jombang dan Upaya-upaya Mengatasinya*” writer wants to know the cause of a decrease in votes for the party and the extent to which PKB, PKB sought reinforcement elektabilitas in Jombang district. Problem of this research is to question whether the cause of the decline in collective voice in Jombang district, and how collective efforts to restore existence and thrive in Jombang district. This study analyzed the theory of the party to be able to see the internal structure of PKB. In this study found the cause of the decline in the district of Jombang PKB sound due to several factors, namely, the internal conflict in the PKB duality, fragmentation of the internal voice in NU clerics centric culture, politic of money. And the efforts made so far is the first consolidated PKB party, political learning and socialization to the cadre of PKB, allocate of PKB, allocate as much as you and plans that have been prepared to deal with people who tend to be pragmatic. According to the researchers, from this study it can be concluded that

¹ Judul penelitian ini merupakan hasil dari penelitian skripsi penulis

² Penulis merupakan mahasiswa S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga angkatan 2010

there is disappointment on top of PKB NU deemed not to focus again on the original purpose, as well as the prevailing hegemony Kyai and also the existence of a culture of people who enjoy a handsome money politics politicians

Keywords : InternalConflict, Hegemony, Money Politics, Consolidation

Pendahuluan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik Islam yang ada di Indonesia. PKB telah mengikuti pesta demokrasi sejak Pemilu 1999. Dalam sejarahnya, PKB pernah menjadi partai besar dalam sejarah era reformasi ini. Pada Pemilu 1999 sebagai pemilu yang pertama kali diikuti, PKB langsung mendapatkan posisi 3 besar dengan perolehan suara 12,61% sebagai perolehan suara tertinggi dalam sejarah partai dan mendapatkan 51 kursi di parlemen. Sedangkan pada pemilu 2004, suara PKB turun menjadi sebesar 10,57% namun perolehan kursi partai di parlemen naik satu kursi menjadi 52 kursi. Namun, pada pemilu 2009 lalu, perolehan suara PKB turun jauh hanya menjadi 4,94% dengan perolehan kursi di parlemen sebesar 21 kursi.

Di Jawa Timur, PKB memiliki basis yang cukup kuat. Di wilayah tapal kuda Jatim, melingkar dari Banyuwangi, Jombang, Bojonegoro, Gresik, hingga menyeberang ke Pulau Madura, ini adalah basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dimana di daerah tapal kuda tersebut kultur nahdliyin begitu kokoh mengakar dimana nahdliyin merupakan “anak kandung” dari PKB. Hal itu terbukti pada pemilu tahun 1999 dimana PKB mendapatkan perolehan suara sebesar 35,8% dan perolehan suara pemilu 2004 yakni 30,8%. Namun, pada Pemilu 2009, partai ini kehilangan 10 kursi sehingga hanya bisa mengumpulkan 13 kursi dengan perolehan suara 11,83% di Jawa Timur.

Menurunnya perolehan suara PKB di Jawa Timur yang mencapai 50% ini juga terjadi di Kabupaten Jombang yang notabene merupakan daerah tapal kuda yang merupakan basis dari PKB. Pada Pemilu 1999, partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang tersebut mendapatkan 12 kursi di DPRD Jombang dan menduduki peringkat kedua setelah PDI-P. Kemudian pada pemilu 2004, terjadi kenaikan yang cukup menggembirakan dimana suara PKB mengalami kenaikan yakni mendapatkan 202.457 suara dan 15 kursi di DPRD Kabupaten Jombang. Namun pada Pemilu 2009 nampaknya hasil yang didapat oleh PKB tidak

menggembirakan. Suara yang diperoleh di Kabupaten Jombang merosot bahkan mencapai 50%. PKB hanya mendapatkan 76.761 suara dan 7 kursi di DPRD.

Penurunan suara PKB dari tahun ke tahun baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Khususnya di Kabupaten Jombang yang termasuk wilayah tapal kuda dimana menjadi basis kuat PKB. Jombang yang mayoritas penduduknya adalah warga NU yang selama ini dianggap sebagai lumbung suara utama bagi PKB di setiap pemilu, ternyata tidak mampu mempertahankan dan menyumbangkan suaranya untuk PKB. Jombang yang juga merupakan daerah dengan banyaknya pondok pesantren sekaligus tempat lahirnya tokoh-tokoh NU tampaknya sekarang tidak menjadi jaminan untuk PKB memperoleh suara terbanyak disana. Bahkan figur besar Partai Kebangkitan Bangsa yakni KH. Abdurrahman Wahid yang merupakan salah seorang pendiri PKB yang juga lahir dan besar di Jombang serta menjadi Kyai Besar di daerah tersebut sekarang tidak lagi menjual.

Partai Politik : Landasan Teori

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas. Setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu parpol selalu ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan dukungan rakyat.

Pendekatan Institusional sendiri memandang Partai Politik sebagai lembaga yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan.³ Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan representatif of ideas⁴ yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan pelembagaan partai politik pada

³ Rahman Arifin, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perpektif Struktural Fungsional*, (Surabaya: SIC, 2002), hal. 21

⁴ Robert Michael, *Partai Politik Dalam Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hal. 24

masa transisional, setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry Diamond dan Richaerd Gunther.⁵ Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan dirinya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelebagaan pengembangan partai poltik hendaknya dikedepankan, yaitu: Pertama, keutuhan internal. Suatu keutuhan internal partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalisme internal), adanya dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik kedepan. Kedua, ketangguhan organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi dirinya, tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber daya-sumber daya ke level-level yang lebih rendah dari tingkat pusat atau nasional.

Ketiga, identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam menkonstruksi identitas partai yang kuat.

Pembahasan

Ada 3 faktor yang menjadi penyebab menurunnya suara PKB di Kabupaten Jombang yaitu adanya konflik dualisme yang terjadi di internal PKB, terpecahnya suara NU, dan money politics. Yang pertama yaitu konflik dualisme di internal PKB. Partai Kebangkitan Bangsa seakan tidak pernah lepas dari konflik. Konflik yang mempunyai dampak besar hingga sekarang. Konflik tersebut bermula pada tahun 2008. Konflik dimulai dari pemecatan Ketua Umum Muhaimin Iskandar oleh Ketua Umum Dewan Syura Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Peristiwa pemecatan itu berawal dari kemarahan Gus Dur terhadap Muhaimin. Ada beberapa alasan mengapa Gus Dur menjadi sangat marah kepada Muhaimin. Pertama, Gus Dur beranggapan bahwa Muhaimin telah bersikap *double standard*, menjadi alat Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mendongkel Gus Dur dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Gus Dur menuding Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah orang yang menyebabkan

⁵ Larry Diamond & Richard Gunther, *Political Parties and Democracy*, (London: The John Hopkins University Press, 2001), hal. 21

terjadinya konflik internal PKB melalui tangan Muhaimin. Hal ini dibuktikan dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Muhaimin. Menurut Gus Dur, ketika diputuskan untuk mundur, sebetulnya Muhaimin awalnya bersikap menerima. Namun, Gus Dur merasa bingung mengapa belakangan Muhaimin berubah dan menolak pemberhentian tersebut. Karenanya, Gus Dur bertekad untuk tetap tidak mau islah dengan Muhaimin karena ia beranggapan bahwa Muhaimin sudah tidak jujur.

Kedua, pengangkatan Lukman Edy sebagai Menteri Daerah Tertinggal tidak terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gus Dur dan dimusyawarahkan di internal PKB. Ketiga, Gus Dur mensinyalir Muhaimin telah digunakan oleh pihak ketiga sehingga gagal meloloskan Calon Gubernur DKI Jakarta dari PKB. Gus Dur sudah memberi surat peringatan kedua kepada Muhaimin dan mengancam akan menggelar Muktamar Luar Biasa. Sementara itu, Muhaimin sendiri mengklarifikasi semua tuduhan Gus Dur, pada saat berziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, dengan mengatakan, “Saya melawan Gus Dur? Saya ini siapa?”

Akhirnya pada Maret 2008, rapat pleno memutuskan untuk meminta Muhaimin mengundurkan diri. Namun, Muhaimin tidak terima dengan hasil putusan rapat pleno itu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dan dikabulkan. Gugatan yang diajukan oleh Muhaimin yang kemudian dikabulkan itu ditanggapi oleh Gus Dur dengan mengajukan kasasi ke MA, namun di tolak. MA juga menolak legalitas Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang diselenggarakan oleh kubu Gus Dur di Parung dan MLB Ancol yang diselenggarakan kubu Muhaimin. Hasil putusan MA mengembalikan DPP PKB hasil Muktamar Semarang. Muhaimin sebagai Ketua Umum dan Lukman Edy sebagai Sekjennya.

Akan tetapi, putusan MA itu tidak kemudian dapat menyelesaikan persoalan di tubuh PKB secara keseluruhan. Hal ini terlihat belakangan ketika Gus Dur melaporkan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB dan Lukman Edy selaku Sekjen ke Bareskrim Mabes Polri. Keduanya dianggap tidak pernah mengajak Gus Dur dalam segala kebijakan Partai. Menurut Gus Dur, dia mengadukan Muhaimin dan Luman Edy sebagai pihak yang melanggar AD/ART. Bentuk pelanggaran ada dalam setiap Surat Keputusan dan sejenisnya, termasuk penetapan anggota legislatif, yang seharusnya ditandatangani dua pihak, yakni Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz.

Konflik yang terus-terusan terjadi dalam tubuh internal PKB tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya perolehan suara PKB dalam pemilu legislatif dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Jombang, penurunan yang dirasa paling drastis terjadi pada pemilu legislatif pada tahun 2009. Penurunan suara yang terjadi hampir 50%, yang pada pemilu legislatif 2004 PKB mendapatkan 15 kursi di DPRD Jombang namun pada pemilu legislatif 2009 hanya mendapatkan 7 kursi.

Yang menjadi penyebab dari konflik internal yang terjadi adalah figure pemimpin yang terlalu kuat di PKB. Figure yang terlalu kuat inilah yang berpotensi mematikan kaderisasi di dalam PKB ini sendiri. Dalam kasus ini setiap perseteruan yang terjadi di PKB selalu melibatkan ketua dewan syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh sentral yang mempengaruhi seluruh kebijakan dengan beberapa orang yang dianggap Gus Dur sudah tidak sejalan dengannya, misalnya saja kasus pemecatan Mathori Abdul Djalil, kasus penggusuran Alwi Shihab, pemberhentian Choirul Anam, hingga konflik yang terjadi dengan kubu Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum dewan tanfidziyah. Ditambah dengan ketidakmampuan elit partai dalam mengelola konflik dalam tubuhnya menyebabkan menurunnya kepercayaan dan keberpihakan masyarakat karena sudah lelah dan bosan menyaksikan konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai, dalam konteks ini yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah terjadinya konflik yang terus meradang PKB, pecahnya PKB menjadi dua kubu juga terjadi. Kubu ini terpecah dalam PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin. Banyak kader yang masih tetap bertahan pada kubu Muhaimin, dan ada juga beberapa kader yang berpindah pada kubu Gus Dur. Akan tetapi kader PKB yang berada pada kubu Muhaimin dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam keadaan PKB tanpa Gus Dur. Karena pada dasarnya, konflik dalam partai bukan menjadi alasan untuk partai tidak kembali menjalankan tugas dan fungsinya terutama tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya saja seperti struktur elite pada PKB mereka tetap gigih melaksanakan tugasnya sebagai kader PKB dan mengemban amanah dibawah kepemimpinan Muhaimin. Karena bagaimanapun juga, sebuah visi dan misi partai politik yang telah dibangun sejak awal, harus tetap di perjuangkan dan dilaksanakan walaupun banyak masalah yang dialami sebuah partai politik.

Sebuah konflik, bukanlah hal yang tidak wajar dalam partai politik, akan tetapi sebuah cobaan tersebut justru harus menjadi evaluasi sebuah partai agar partai tersebut dapat menjadi lebih baik lagi. Tugas dari sebuah kader memang harus tetap mempertahankan keutuhan internal partai dan ketangguhan organisasinya. Karena tanpa adanya hal itu, mesin sebuah partai politik tidak dapat berjalan dengan baik. Memupuk rasa solidaritas antar kader dengan diimbangi kecintaan terhadap sebuah partai politik dengan tujuan tertentu akan dapat meraih cita-cita sebuah partai politik.

Pada pemilu legislatif di Kabupaten Jombang, terlihat bahwa pada pileg di tahun 2004 PKB mengalami kenaikan perolehan suara. Namun, pada pileg selanjutnya di 2009, banyak mengalami penurunan suara yang cukup drastis di beberapa Kecamatan di Jombang. Seperti halnya kecamatan Diwek dalam hasil pereolehan suaranya pada tahun 2004 memperoleh 21.305 suara yang kemudian pada pileg 2009 turun menjadi hanya 8.461 suara, selisih perolehannya sebanyak 12.844 suara. Dalam hasil penelitian di lapangan, warga Diwek pada pemilu sebelumnya memilih PKB yang kemudian saat pileg 2009 berpindah kebeberapa partai lain dikarenakan berbagai macam alasan.

Adanya rasa kekecewaan terhadap masyarakat, yang dimana patron dalam sebuah partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemilu, seorang patron ikut menentukan konsituen. Gus Dur di anggap seorang figur yang kuat bagi masyarakat Jombang, bagi mereka tidak memilih PKB jika bukan Gus Dur yang memimpin partai tersebut. Tidak jauh dengan praktik politik uang di masyarakat Jombang yang dimana dalam situasi yang terdesak masyarakat tertarik dengan sebuah imbalan dalam pemilu. Dan dalam hasil penelitian tersebut, kecamatan Diwek adalah kecamatan yang perolehan suaranya menurun paling banyak di banding kecamatan lainnya.

Selain kecamatan Diwek yang memiliki penurunan perolehan suara sebanyak 8.461 suara dengan alasan tertentu, didaerah lain seperti kecamatan Tembelang juga mengalami penurunan suara yang cukup sedang di pileg 2009. Dari pileg 2004 dengan perolehan suara 7.699, saat pileg 2009 menjadi hanya 1.089 suara. Memiliki jumlah selisih sebanyak 6.610 suara. Selain itu, terdapat Kecamatan Ngusikan yang hasil perolehan suara pada pileg 2004 sebanyak 3.738 dan pada saat pileg 2009 menurun hanya mendapat 2.465 suara, berarti selisih 1273 suara pada pileg sebelumnya.

Pasca terpecahnya PKB menjadi dua kubu yakni kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur, kondisi Internal PKB berubah, beberapa kader yang keluar dan berpihak pada PKB Gus Dur dan meninggalkan PKB Muhaimin, begitu sebaliknya, banyak kader yang tetap bertahan pada PKB Muhaimin. PKB Gus Dur kini didirikan dan di pimpin oleh Yenny Wachid, anak kandung Gus Dur yang akhirnya di beri nama PKBIP. Kebetulan partai ini belum lolos syarat verifikasi pemilu, sehingga partai ini belum dapat masuk di parlemen.

Jika PKB Muhaimin ini tetap berjalan seperti visi dan misi yang sudah ada, Partai tetap berjalan dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai partai politik, dan menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Seperti mengikuti pemilu, melakukan pengkaderan dan sebagainya. dan melakukan sebuah upaya agar PKB tetap hidup yakni seperti melakukan konsolidasi partai, kemudian tidak lupa untuk memberikan sebuah pembelajaran politik dan sosialisasi pengetahuan tentang partai politik dan tugas kader-kadernya sekaligus tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebuah partai politik dan kader partai yang sepenuhnya mengabdikan pada bangsa dan negara. Meski pernah terpecah karena konflik dualisme, PKB Muhaimin kini masih memiliki legitimasi terhadap masyarakat khususnya warga NU.

Sebagai partai yang pernah berkonflik, PKB yang dipimpin Muhaimin ini tetap menjaga dan lebih meningkatkan ketangguhan organisasi didalam partainya. Bagaimanapun juga, ketangguhan sebuah organisasi sangat penting untuk di ciptakan, karena melaksanakan sebuah tugas, fungsi dan tanggung jawab sebuah partai politik tergantung pada ketangguhan dan keutuhan internal partai tersebut, agar sebuah partai dapat melakukannya sesuai dengan visi dan misi dengan baik. Keutuhan dan ketangguhan sebuah partai politik dapat menghidupkan sebuah mesin partai yang dapat berjalan dengan baik.

Nahdhatul Ulama mempunyai basis yang sangat kuat di Kabupaten Jombang. Dalam pandangan yang ada selama ini, memang sulit untuk mengingkari bahwa PKB adalah 'anak kandung' NU. Namun tidak berarti semua warga NU memberikan suara mereka kepada PKB dalam pemilu. Dengan banyaknya konflik yang telah terjadi dalam tubuh internal PKB, membuat struktural NU Kabupaten Jombang kecewa dan bersikap acuh terhadap .PKB dianggap tidak fokus lagi dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam merepresentasikan politik warga NU. Hubungan antara PCNU Jombang dan DPC PKB Jombang pun menjadi kurang harmonis pasca dualisme yang terjadi serta menurunnya kepercayaan dari PCNU Jombang sehingga dari

jajaran pengurus PCNU Jombang tidak lagi berminat untuk membantu membesarkan partai orang NU tersebut.

Selain itu, suara NU di Kabupaten Jombang memang terpecah dalam beberapa partai politik. Partai-partai politik itu diantaranya adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Golkar (Golongan Karya), PDI Perjuangan, dan PKB. meskipun Jombang adalah basis utama NU tingkat satu Provinsi Jawa Timur, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan jaminan bahwa suara yang diberikan oleh NU akan diberikan pada PKB semua.

NU yang ada di Kabupaten Jombang terbagi menjadi dua golongan yakni NU abangan dan santri. Golongan NU abangan ini bersifat cultural dimana mereka lebih memilih partai politik yang berideologi nasionalis. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Jombang adalah masyarakat yang masih kental dengan kultur dan kebiasaan untuk patuh terhadap kyai yang dipercayainya. Di kalangan NU sendiri, tidak sedikit kyai yang juga menjadi panutan masyarakat Jombang. Masyarakat Jombang memiliki kebiasaan untuk mengikuti apa yang menjadi panutannya, tidak dalam hal keagamaan ataupun kehidupan sehari-hari saja bahkan dalam hal pilihan politik pun mereka mengikuti apa yang dipilih oleh kyai mereka. Seperti yang telah dijelaskan diatas, walaupun NU merupakan 'saudara kandung' PKB, namun tidak semua warga NU memilih PKB, beituapun dengan para kyai dan santrinya serta masyarakat yang mengikutinya.

Dalam event demokrasi lima tahunan yang digelar di Indonesia baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, isu adanya *money politics* selalu mewarnai perhelatan ini tak terkecuali di Kabupaten Jombang. Sulit sekali menghilangkan budaya buruk tersebut. Pola pikir masyarakat yang pragmatis ini yang seringkali membuat situasi politik pada pemilu tidak murni pilihan dari hati. PKB sebagai partai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam berpolitik sangat menghindari hal-hal curang seperti ini. Inilah faktor yang dirasa juga mempengaruhi penurunan suara PKB di Jombang. Dimana partai lainnya berlomba-lomba memberikan imbalan kepada masyarakat agar memperoleh suara, PKB justru tidak melakukannya.

Menurunnya suara PKB di Kabupaten Jombang dalam pemilu tentunya menjadi bahan evaluasi yang sangat penting. Dengan terjadinya berbagai konflik yang mengakibatkan

menurunnya suara dan perolehan kursi di DPRD, PKB tentunya tidak berdiam diri. Banyak upaya-upaya dan langkah politik yang dilakukan untuk tetap mempertahankan elektabilitas partai serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Jombang dan warga NU khususnya terhadap kinerja PKB agar kembali fokus dan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa langkah atau upaya yang diambil oleh PKB untuk mampu mengembalikan kembali eksistensinya khususnya di Kabupaten Jombang, agar pada pemilu-pemilu berikutnya mampu meraih suara yang maksimal. Yaitu yang pertama konsolidasi partai. Konsolidasi di dalam internal PKB menjadi sangat penting, sebab kesolidan di internal partai menjadi kunci untuk mengupayakan konsolidasi di eksternal partai. Dengan melakukan konsolidasi partai tingkat cabang ke PAC dirasa mampu untuk menghidupkan mesin partai kembali.

Konsolidasi partai ini harus terus dilakukan agar mesin partai tetap bekerja sehingga PKB tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Karena, tanpa adanya mesin partai yang berjalan dengan bagus, partai politik tidak akan dapat bekerja dengan baik. Bagaimanapun juga mesin partai adalah jantung dimana partai politik tetap bisa berkibar dan menjalankan program-programnya di bidang social dan lain-lain.

Maksud dilakukannya konsolidasi partai adalah memusyawarahkan segala sesuatu keputusan yang akan diambil oleh partai untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, untuk memusyawarhkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada internal partai dengan tujuan agar mencari titik temu sebuah permasalahan itu sendiri agar kedua belah pihak yang sedang berkonflik menemukan titik temu.

Selain upaya konsolidasi yang dilakukan di lingkup internal maupun eksternal partai, langkah lain PKB untuk mengupayakan pembenahan dari merosotnya suara adalah juga melakukan konsolidasi calon legislative memberikan pembelajaran politik dan sosialisasi pada warga NU sebagai penyalur aspirasi terhadap PKB. Jadi yang dimaksudkan adalah setiap calon legislatif yang maju melalui PKB benar-benar menguasai masalah politik melalui pembelajaran politik yang diberikan oleh partai. Sehingga calon legislatif yang berasal dari PKB tersebut mampu memahami apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari masyarakat khususnya basis massa dari PKB itu sendiri.

PENUTUP

Penurunan suara PKB dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Jombang, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peristiwa konflik yang terjadi pada intern partai sehingga terjadi dualisme kepemimpinan dimana dampak dari konflik tersebut menyebabkan menurunnya elektabilitas PKB di Jombang. Yang kedua terpecahnya suara NU yang merupakan basis suara utama PKB di Jombang dan yang ketiga maraknya *money politics* yang terjadi di kalangan masyarakat Jombang.

Upaya PKB untuk mengembalikan eksistensi dan elektabilitas di Kabupaten Jombang yang pertama yaitu dengan melakukan konsolidasi partai. Konsolidasi didalam internal PKB menjadi kunci untuk kesolidan agar mesin partai tetap bekerja dan menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Yang kedua yaitu pembelajaran politik dan sosialisasi kepada seluruh kader dan calon legislatif. Hal ini dilakukan agar setiap calon legislatif PKB benar-benar menguasai masalah-masalah politik melalui pembelajaran yang diberikan oleh partai. Yang ketiga adalah, mengalokasikan dana APBD agar para anggota legislatif yang berasal dari PKB dapat mengalokasikan dan mengelola dana APBD dengan sebaik-baiknya agar dapat membangun image yang baik serta mempertahankan fungsional partai dan sebagai pendidikan untuk kader dalam mengalokasikan dana dengan efisien dan sebaik-baiknya sekaligus memberikan pendidikan terhadap kader dalam proses politiknya tidak menggunakan politik uang sebagai alat untuk memperoleh dukungan. Yang terakhir adalah, melakukan sebuah perencanaan dan merancang pola-pola bagaimana PKB dalam kondisi masyarakat pragmatis ini dapat bertemu. Tujuannya mendidik masyarakat menghilangkan kebiasaan menerima uang atau imbalan dalam menentukan pilihan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amal, Ichlasul. 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Arifin, Rahman. 2002. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Fungsional*. Surabaya: SIC
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indiebookcorner
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djawamaku, H. Anto. 2005. *Perpecahan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya, dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal Vol. 34, No.2*. (Jakarta: CSIS)
- Diamond, Larry & Richard Gunther. 2001. *Political Parties and Democracy*. London: The John Hopkins University Press
- Horrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*,. Jakarta: Kencana Pernada Group
- Mantra, I. Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Michael, Robert. 1984. *Partai Politik Dalam Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Muawiyah, Andi., dkk. 2011. *AD ART Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suroto, Ir & Doddy Rudianto. 2003. *Partai-Partai Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Citra Mandala Pratama)

Website:

<http://hana02.student.umm.ac.id> , diakses pada 3 Oktober 2013